

Dr. Aksin Wijaya dkk.

BERISLAM DI JALUR TENGAH

Jaminan Kepuasan

Apabila Anda mendapatkan buku ini dalam keadaan cacat produksi (di luar kesengajaan kami), seperti halaman kosong atau terbalik, silakan ditukar di toko tempat Anda membeli atau langsung kepada kami dan kami akan menggantinya segera dengan buku yang bagus.



IRCiSoD

Pengantar Penyunting

BERISLAM DI JALUR TENGAH

Penulis: Dr. Aksin Wijaya dkk.
Penyunting: Dr. Aksin Wijaya & A. Yusrianto Elga
Tata Sampul: Alfin Rizal
Tata Isi: Vitrya
Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Maret 2020

Penerbit
IRCiSoD
Sampangan Gg. Perkutut No.325-B
Jl. Wonosari, Baturetno
Banguntapan Yogyakarta
Telp: (0274) 4353776, 081804374879
Fax: (0274) 4353776
Email: redaksi_divapress@yahoo.com
sekred2.divapress@gmail.com
Blog: www.blogdivapress.com
Website: www.divapress-online.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wijaya, Aksin dkk.

Berislam di Jalur Tengah/Aksin Wijaya dkk.; penyunting, Aksin Wijaya & A. Yusrianto Elga-
cet. 1-Yogyakarta: IRCiSoD, 2020

472 hlmn; 15,5 x 24 cm
ISBN -

I. Religion & Spirituality
II. Aksin Wijaya & A. Yusrianto Elga

I. Judul

Di setiap pertemuan tahunan para Direktur Pascasarjana PTKIN Indonesia, yang sering kali menjadi topik diskusinya adalah terkait dengan pengembangan kelembagaan ke Pascasarjana. Baru pertemuan di Pascasarjana IAIN Tulungagung (2019), para Direktur Pascasarjana itu menyinggung pengembangan dimensi keilmuan yang sejatinya dikembangkan dan ditransformasikan oleh pascasarjana. Salah satu isunya adalah bagaimana pascasarjana menawarkan pemikiran keislaman dan keindonesiaan untuk menjadi alternatif di antara sekian banyak pemikiran yang berseliweran tidak karuan di media sosial yang karena mudahnya diakses, masyarakat pun mulai mabuk agama, dan agama yang mereka minati adalah agama yang disebar oleh para penjual agama melalui media sosial.

Agama yang disebar melalui media sosial lebih diminati daripada agama yang disebar melalui lembaga pendidikan. Tokoh agama yang disebut ustadz, yang menyebarkan pemikirannya melalui media sosial, lebih dihormati daripada para ulama, kiai, doktor dan profesor yang menyebarkan pemikirannya melalui lembaga pendidikan formal, termasuk pascasarjana. Melihat fenomena itu, para Direktur Pascasarjana merasa bertanggung jawab untuk menghadapi fenomena itu, dengan menulis dan menerbitkannya dalam bentuk antologi.

Percikan pemikiran para Direktur Pascasarjana PTKIN ini penting, bukan hanya karena pascasarjana menjadi simbol keilmuan Perguruan Tinggi, tetapi juga otoritas keilmuan mereka yang pada umumnya sudah bertitel profesor, minimal diakui keakarannya. Sebagai simbol otoritas keilmuan, tentu saja mereka mempunyai tanggung jawab moral dan intelektual dalam menghadapi era yang serba digital ini, yang justru memarjinalkan mereka dalam jagat pemikiran di Indonesia. Para Direktur pun menuangkan gagasan-gagasannya

tentang keislaman dan keindonesiaan dengan berbagai topik dan perspektif yang beragam sesuai bidang keilmuan mereka. Kendati tidak disebarakan melalui media-media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter yang serba cepat, buku antologi ini minimal bisa diakses oleh mereka yang masih merasa nyaman dengan membaca buku fisik daripada media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sebagai penyunting, saya coba mengklasifikasi tulisan-tulisan ini menjadi lima bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari beberapa tulisan yang setema. Bagian-bagian itu disusun berdasarkan kajian yang berkaitan dengan tempat, tema dan hal-hal yang bersifat teoretis bidang kajian al-Qur'an dan fiqh. Kendati demikian, sidang pembaca bisa memulai bacaannya dari artikel mana saja, lantaran semua artikel itu ditulis oleh penulis yang berbeda, waktu yang berbeda, untuk kasus dan tujuan yang berbeda.

Buku anatologi ini melengkapi buku antologi karya para Rektor PTKIN yang berjudul "Moderasi Beragama" yang terbit sebelumnya. Sebagaimana buku itu, buku antologi ini dimaksudkan untuk mendialogkan antara keislaman dan keindonesiaan, bukan mempertentangkan keduanya. Bahkan dengan peradaban Barat sekalipun. Inilah salah satu aspek dari moderasi beragama. Bisa dikatakan, moderasi beragama adalah agama yang bersifat dialogis dengan peradaban yang berbeda-beda. Mengapa mesti dialogis?

Jawabannya tak lain adalah karena beragama merupakan hak asasi manusia, dan Tuhan memberikan haknya kepada manusia dengan menu-runkan agama tauhid dengan beragam syari'at. Tauhid sebagai hak Tuhan yang sejatinya dipegang teguh oleh manusia, ia bersifat universal, tidak mengalami perubahan; sedangkan syari'at adalah hak manusia yang sejatinya diberikan secara berbeda-beda oleh Tuhan, ia bersifat partikular dan sejatinya mengalami perubahan dan beragam keragaman. Perubahan dan keragaman itu tidak hanya berkaitan dengan "Syari'at" (S besar) yang dibawa para nabi Samawi, tetapi juga berkaitan dengan internal "syari'at" (s kecil) yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Bahkan, syari'at yang disebut terahir itu mempunyai beragam makna dan makna-maknanya bersifat dinamis dan dialogis. Sisi dinamis dan dialogis inilah yang memungkinkan syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad mampu berdialog secara kreatif dengan beragam peradaban, baik peradaban Arab, Barat maupun Indonesia.

Tulisan yang ada di dalam buku antologi ini merupakan hasil upaya para intelektual muslim Indonesia yang tergabung dalam Forum Direktur

Pascasarjana (FORDIPAS) PTKIN dalam mendialogkan Islam dengan peradaban Nusantara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik Kementerian Agama dan jajarannya yang selalu memfasilitasi dan mensupport kegiatan kami, termasuk penerbitan buku ini, maupun para Direktur Pacasarjana yang meluangkan waktunya untuk menuangkan gagasan-gagasannya yang brilian, dan menghadiahkannya untuk peradaban Nusantara. Terima kasih juga disampaikan kepada Penerbit IRCiSOD, Mas Edi Mulyono yang bersedia menerbitkan karya ini.

Indonesia, 30 Januari 2020

Aksin Wijaya

(Penyunting)

Kata Pengantar

Pascasarjana PTKIN dan Kiblat Moderasi Islam

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

Jumat, 3/1/2020 keluarga besar Kementerian Agama, secara serentak melakukan upacara bendera memperingati Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-74 di seluruh Indonesia. Tema yang diusung cukup sederhana, akan tetapi maknanya cukup dalam dan mengena: “Umat Rukun Indonesia Maju”. Pemilihan tema tersebut, dilatari oleh kenyataan bahwa kerukunan di negeri Indonesia tercinta ini sedang dirundung keprihatinan. Sebab, meskipun tidak sampai terjadi konflik horizontal secara fisik, namun “perang wacana” di media sosial, yang terkadang sangat tidak manusiawi, susah sekali dibendung. Boleh jadi, di antaranya, ini merupakan implikasi dan imbas politik dari pilkada, khususnya Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, dan juga pilpres, yang masih menyisakan “simpul-simpul” konflik tersebut.

Kekecewaan dan kekalahan dalam kontestasi politik, secara alamiah sebenarnya hal yang sangat biasa. Tak ubahnya para peserta didik saat yudisium dan menerima raport sebagai hasil evaluasi belajar mereka. Atau anak-anak yang sedang bermain, menang dan kalah adalah biasa saja. Boleh jadi, perbedaannya dalam kontestasi politik, terlalu banyak menghabiskan biaya, melibatkan jumlah sangat besar massa, apalagi sampai muncul kata-kata yang sepatutnya tidak muncul, seperti “cebong” dan “kampret”, “sontoloyo”, dan lain-lain yang sejenis, dan ini tidak pernah muncul dalam pemilu sebelumnya.

RI-1 terpilih, sudah mengakomodasi sosok yang semula menjadi “rival” dalam kontestasi pun sudah “didapuk” menjadi anggota kabinet. Ini mirip

dengan “tradisi” sebagian kampus, yang pasca suksesi rektor atau ketua, ditempuh model konsolidasi, dengan memberi posisi atau jabatan tertentu, agar tidak ada “konflik” berkelanjutan. Akan tetapi, dalam perspektif sejarah politik masa lalu, tampaknya secara perlahan, menjadi semacam “kaidah” atau “proposisi” bahwa pendukung militan yang “kecewa” atau “dikecewakan”, maka mereka cenderung menjadi “khawarij” gaya baru, yang cenderung “radikalis” dan bahkan “ekstremis”.

Tanpa bermaksud mengambil “legitimasi” terhadap munculnya paham radikalis—dan ekstremis—ini mengingatkan kita pada sosok Abdurrahman bin Muljam, yang dikenal sebagai penghafal dan pengajar al-Qur’an di masa-masa Sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Sosok yang semula pengikut setia Ali, akibat kecewa berat terhadap langkah politik menantu Rasulullah Saw. itu, yang mestinya sudah memenangi peperangan Shifin, namun karena setelah Muawiyah mengangkat mushaf (al-Qur’an) di ujung tombaknya meminta gencatan senjata, diselesaikan melalui *tahkim* atau arbitrase. Akibat *tahkim* atau arbitrase, akhirnya jabatan Ali sebagai khalifah, dimakzulkan dan Muawiyah dibiayai menjadi khalifah pertama Dinasti Umayyah.

Sementara itu, para direktur pascasarjana yang tergabung dalam Forum Direktur Pascasarjana PTKIN se-Indonesia—biasa disebut Fordipas—ikut ambil bagian dalam menyemai komitmen untuk terus mengusung moderasi Islam, melalui karya-karya dalam artikel-artikel yang diracik oleh sahabat saya, Dr. Aksin Wijaya, penulis yang sangat produktif, dan diberi judul “Ber-Islam di Jalur Tengah” (Percikan Pemikiran Para Direktur Pascasarjana PTKIN tentang ber-Islam di Indonesia).

Para pembaca tentu sangat maklum dan memahami bahwa konsekuensi karya antologis dan beragam variasi disiplin ilmunya, sudah tentu tidak begitu nyaman, dinikmati alur ide dan penyemaian gagasan moderasi Islam di Indonesia. Karena itu, boleh jadi dibutuhkan sedikit ekstra konsentrasi dalam menangkap makna, ide, gagasan, dan komitmen para direktur pascasarjana PTKIN se-Indonesia. Itu pun, boleh jadi karena kesibukan masing-masing direktur dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat sebagai direktur pascasarjana, dengan beragam tantangan dan problema yang dihadapinya, belum semuanya mengirimkan artikelnya.

Selama saya menjalankan amanat teman-teman sebagai ketua Fordipas (2016–2019), secara umum memang masih berkuat pada persoalan internal. Namun, melalui karya antologis ini, diharapkan bahwa sesungguhnya ketika

asa dan obsesi untuk melakukan internasionalisasi, tampaknya masih harus banyak berhadapan dengan berbagai kebijakan yang belum menguntungkan angan dan cita internasionalisasi tersebut.

Pascasarjana yang dalam “mazhab” atau “rezim” KKNI—baca Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia—bertugas menyiapkan para lulusan yang siap menjadi pemikir, mujtahid, dan sekaligus mujahid akademik, yang siap menemukan nilai-nilai kebaruan (*novelty*) dalam karya-karya tesis dan disertasi mereka, harus tampil dengan nyali dan keberanian besar, berpikir dan melangkah *out of the box* atau melakukan pembaharuan, agar kehadiran dan keberadaan pascasarjana sebagai *kawah condrodimuko* untuk *mengejawantah* para calon akademisi yang andal, kompeten, memiliki keunggulan kompetitif, dan siap berbagi ilmu yang bisa membawa ide besar Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Pascasarjana sudah saatnya dikemas dalam “pesantren-intelektual” yang diamanati dan bertanggung jawab, untuk terus menggali, memahami, mengkritisi, dan mengamalkan ajaran al-Qur’an, Sunnah Rasulullah Saw., *turats* para ulama mujtahid terdahulu, sekaligus memiliki kesiapan kompetensi dan keterampilan untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. Indonesia yang harus menghadapi bonus demografi, bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan *information and technology* (IT), maka Pascasarjana PTKIN se-Indonesia dituntut untuk berada di garda depan dalam ikhtiar mewujudkan Indonesia sebagai kiblat moderasi Islam dunia.

Mitigasi dan Cegah Dini Radikalisme

Menteri Agama RI mengharapkan pada seluruh jajaran dan keluarga besar Kementerian Agama, agar terus-menerus mengabdikan pada bangsa Indonesia tercinta ini. Kita perlu menjaga kesalehan dalam beragama dan bernegara sekaligus. Apa pun agama yang dianutnya, mengajarkan kesalehan. Saleh artinya patut, selaras, dan baik. Negara menjamin kebebasan beragama pada warganya. Islam pun tidak membenarkan ada pemaksaan dalam beragama. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Karena itu, mereka yang tidak beragama atau tidak berketuhanan, maka tidak selayaknya hidup di Indonesia.

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan

kepercayaannya itu.” Pilihan agama merupakan hak prerogatif Allah, Tuhan Yang Maha Pencipta. Dalam negara Pancasila, siapa pun tidak diperkenankan melakukan propaganda anti-agama, penistaan terhadap ajaran agama dan simbol-simbol keagamaan, menyiarkan agama dengan pemaksaan, ujaran kebencian dan kekerasan terhadap pemeluk agama yang berbeda. Bahkan kebijakan pemerintah juga tidak boleh bertentangan dengan kaidah agama dan ideologi negara.

“Penguatan identitas keagamaan dan identitas kebangsaan tidak boleh dipisahkan. Dari sinilah moderasi bergama dan bernegara merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan,” tegas Menteri Agama. Karena itu, “Umat Rukun, Indonesia Maju”. Ini untuk menjawab adanya pola-pola pengarusutamaan “politik identitas” yang berimplikasi timbulnya kerawanan sosial atau bahkan potensi konflik sosial yang cukup memprihatinkan.

Keadaan dan keprihatinan sosial tersebut, akan terus berulang secara rutin dan periodik karena setiap ada event politik, apakah itu pemilihan umum presiden-wakil presiden, pemilu legislatif atau pemilu kepala daerah, akan terus menggelayuti bangunan kerukunan dan keharmonisan kehidupan bangsa. Ini tentu akan dapat diperburuk lagi, jika masih terus terjadi “ketimpangan” dan “ketidakadilan” dalam penegakan hukum atau “*law enforcement*” yang tampaknya masih sangat dirasakan adanya “tebang pilih” atau “pisau hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.”

Jika dalam diskursus hukum digagas adanya hukum progresif, di mana menurut Prof. Satjipto Rahardjo, aparat penegak hukum disarankan tidak menjadi “robot” undang-undang, akan tetapi dalam menegakkan hukum senantiasa berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan. Bukan saja terjebak dalam kredo kepastian hukum namun substansinya merusak nilai keadilan dalam masyarakat. Masih banyak kasus, seorang nenek-nenek memungut kayu *carang* atau batang kecil kering di hutan, kemudian ditangkap, dan dibawa ke polisi, ditahan selama tiga bulan. Ada juga hanya karena mengambil sandal jepit bekas yang sudah tidak baik, dijatuhi hukuman. Sementara para “aktor-aktor” yang seharusnya mereka itu adalah koruptor karena merayah dana trilyunan rupiah, seperti asuransi jiwa, asabri, dan lain-lain yang lagi hangat, mereka masih “nyaman-nyaman” saja dan bahkan mungkin masih menikmati gaji besar dan fasilitas negara lainnya.

Saya tidak berpretensi untuk “membenarkan” para nenek dan kakek yang melakukan “pencurian” atau “keterpaksaan” seperti di atas, yang secara nilai ekonomi sangat tidak seberapa, sebagai perbuatan yang benar. Yang

namanya mengambil barang yang bukan hak atau miliknya adalah kejahatan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Akan tetapi, jika kita sepakat untuk melihat dari kacamata dan perspektif keadilan, tentu para petinggi negara ini yang harus siap menanggung risiko dan bertanggung jawab untuk menolong dan menyelamatkan mereka.

Masih banyak sekali tugas dan tantangan yang harus digarap dan dilakukan penelitian oleh para dosen di Pascasarjana PTKI se-Indonesia, agar hasil, temuan penelitian, yang memang secara faktual dan akademik, harus dicarikan solusi melalui kebijakan oleh para pemangku kepentingan, maka kegelisahan, kegalauan, keprihatinan akademik dari para direktur, perlu mendapatkan respons dan solusi dari pejabat di negeri ini.

Arkan atau Agenda Riset Keagamaan Nasional yang dikemas dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994/2018, untuk tahun 2018–2028, dalam konsideran pertimbangan disebutkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, keragaman, dan integrasi ilmu, keagamaan dan sains, diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas riset pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan, baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global.

Karena itulah, Pascasarjana harus ambil bagian dan bertanggungjawab menjalankan misi Arkan 2018–2028, yakni 1. Melaksanakan riset keagamaan, kemasyarakatan, sains dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia yang akan menghasilkan publikasi dan hasil-hasil terkait; 2. Memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan dunia; 3. Mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia berbasis riset dan pengetahuan; dan 4. Mengembangkan riset inovatif yang berkelanjutan.

Dalam bahasa sederhana saya, marilah kita berusaha dan berikhtiar dengan kerja keras dan kerja cerdas, menjadi orang yang saleh bergama dan bernegara. Semoga kita bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan dan membangun negara Indonesia menjadi *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah ripah loh jinawi toto tenterem kerto raharjo nir ing sambikolo, karena siraman pengampunan Tuhan Yang Maha Pengampun.*

Selamat membaca percikan-percikan pikiran para direktur pascasarjana PTKIN se-Indonesia. Selamat kepada para direktur yang “masih” sempat menulis, dan selamat pula kepada para direktur yang masih sibuk menjalankan tugas direktur dan “tidak” atau “belum” sempat meneliti. Apakah masih ada aturan, pejabat tidak boleh meneliti? Kalau masih ada,

tentu tugas Presidium Fordipas (Forum Direktur Pascasarjana) untuk “menggugat” agar asa dan obsesi “internalisasi” pascasarjana dan impian menjadi pusat studi Islam dunia dapat menjadi kenyataan. Semoga semua keluarga besar Fordipas diberi kesehatan, kesuksesan dan keberkahan. Kerja nyata, kerja bersama, bersama-sama bekerja, dan makin ikhlas beramal. *Allah yahdi ila sawai s-sabil. Waffaqana Allah ila thariqin mustaqim.*

Pascasarjana UIN Walisongo, Semarang, 31/1/2020.

DAFTAR ISI

Pengantar Penyunting	5
Kata Pengantar.....	9
Pascasarjana PTKIN dan Kiblat Moderasi Islam (Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA)	9
Mitigasi dan Cegah Dini Radikalisme	11

BAGIAN PERTAMA: ISLAM ANTARA ARAB, BARAT DAN INDONESIA

Islam dalam Pusaran Tiga Peradaban: Pergulatan Islam dengan Identitas ke-Arab-an, ke-Barat-an dan ke-Indonesia-an (Aksin Wijaya)	22
A. Pendahuluan.....	22
B. Mereposisi Kesadaran Identitas dan Epistemologi di Tengah Dominasi Peradaban Barat dan Arab	27
C. Berpikir Kritis-Apresiasiif di Tengah Gelombang Pertarungan Pemikiran Islam di Indonesia	31
D. Tradisi Kritik dalam Kajian Keislaman	33
E. Mengkaji al-Qur’an dengan Perspektif Identitas	40
F. Penutup	44
Hadrami ‘Ulamā’ Network And The Strengthening Of A Shāfi‘īte Fiqh In Central Sulawesi Indonesia (Rusli).....	45
A. Introduction	45
B. Previous Study on Hadrami Arabs	47
C. Islam in Tanah Kaili	50
D. The Emergence of Hadrami Arabs in Tanah Kaili.....	53
E. The Role of Hadrami ‘Ulamā’ in Strengthening <i>Shāfi‘ī fiqh</i> in Palu.....	58
F. Conclusion.....	63

**BAGIAN KETIGA:
NU, ULAMA, PEREMPUAN DAN STRATEGI MENGHADAPI
RADIKALISME DI INDONESIA**

NU dalam Perebutan Kekuasaan: Dinamika Politik Elektoral Warga Nahdliyin pada Pilpres 2019 (Makrum)	204
A. Pendahuluan.....	204
B. Sejarah Sikap Politik NU Pra-Reformasi.....	206
C. Konfigurasi Politik NU Pasca Reformasi.....	210
D. Kontestasi Kiai dan Tokoh Nahdliyin sebagai Politisi	214
E. Garis Kebijakan Politik NU dan Khittah 1926	217
F. Dinamika Politik NU terhadap Garis Kebijakan NU.....	219
G. Sikap Kiai NU dan Arah Preferensi Nahdliyin di Pilpres 2019.....	222
H. Penutup	225
Nahdlatul Ulama, Moderasi Islam, dan Budaya Demokrasi (Ahmad Rofiq)	227
A. Pendahuluan.....	227
B. Indonesia Baru yang Kita Cita-citakan.....	229
C. Ahlussunnah wal Jamaah sebagai Metodologi Berpikir	235
D. NU dan Masa Depan Umat	237
E. Penutup	240
Strategi Kiai Pondok Pesantren dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme (Misdah)	241
A. Pendahuluan.....	241
B. Konsep Strategi.....	243
C. Paham Radikalisme dan Terorisme	245
D. Peran dan Fungsi Pondok Pesantren	247
E. Urgensi Strategi Kiai Pondok Pesantren dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme	248
F. Aplikasi Strategi Deradikalisasi Kiai Pondok Pesantren dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme.....	250
G. Penutup	251
Khilafah dan Implikasinya pada Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Basyariyah di Bangka Belitung (Suparta)	253
A. Pendahuluan	253
B. Implikasi Khilafah Islamiyah terhadap Ukhuwah Islamiyah.....	255
C. Implikasi Khilafah Islamiyah terhadap Ukhuwah Basyariyah.....	261
D. Penutup	272

Perempuan, Keluarga, dan Radikalisme di Indonesia (Umi Sumbulah)	273
A. Pendahuluan.....	273
B. Keluarga dan Tempat Persemaian Radikalisme	276
C. Keluarga dan Potensi Pencegahan Radikalisme	281
D. Mencegah Radikalisme Melalui Penguatan Ketahanan Keluarga	287
E. Penutup	298

**BAGIAN KEEMPAT:
HUBUNGAN ANTARA UMAT BERAGAMA DALAM PANDANGAN
AL-QUR'AN**

Studi atas Tafsir al-Bayan, Mahakarya Penafsir Indonesia T.M. Hasbi ash-Siddiqi (Surahman Amin)	300
A. Pendahuluan.....	300
B. Biografi T.M. Hasbi ash-Siddiqi.....	302
C. Mengenal Tafsir Al-Bayan.....	305
D. Pengaruh dan Kedudukan Tafsir al-Bayan	312
E. Penutup	314
Al-Qur'an tentang Kemajemukan Umat Manusia (Zulkarnaini)	315
A. Pendahuluan.....	315
B. Konsep Pluralisme	320
C. Kemunculan Pluralisme Agama	321
D. Peran Teologi.....	322
E. Kemajemukan dalam Beragama.....	323
F. Kemajemukan Budaya	325
G. Penutup	326
Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif al-Qur'an (M. Galib M.).....	329
A. Pendahuluan.....	329
B. Toleransi sebagai Prasyarat Terciptanya Kerukunan	331
C. Toleransi dan Kerukunan dalam Perspektif al-Qur'an	337
D. Implementasi Toleransi dan Kerukunan pada Masa Rasulullah Saw..	343
E. Penutup	350

**BAGIAN KELIMA:
MAQASYID AL-SYARI'AH DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM**

Reinterpretasi Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Implementasinya dalam Kehidupan Kontemporer (Abdurrohman Kasdi)	352
A. Pendahuluan.....	352

NU dalam Perebutan Kekuasaan: Dinamika Politik Elektoral Warga Nahdliyin pada Pilpres 2019

Makrum

A. Pendahuluan

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, terutama pemilihan pemimpin negara. Basis massa dalam jumlah banyak yang dimiliki NU¹ akan berdampak kuat terhadap kemenangan pihak yang didukung sehingga banyak partai politik maupun calon kandidat yang berusaha meraih simpati dan dukungan dari warga nahdliyin, tak terkecuali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.

Petahana, Joko Widodo (Jokowi), maupun sang penantang, Prabowo Subianto, saling berupaya untuk mendapatkan suara warga nahdliyin. Berbagai strategi politik lantas dilakukan demi meluluskan tujuannya: menjadi presiden RI, periode 2019–2024. Mulai dari menggandeng sosok kyai sebagai calon wakil presiden sebagaimana dilakukan Jokowi pada

Ma'ruf Amin,² hingga silaturahmi ke sejumlah kiai NU di Jawa, seperti yang ditunjukkan oleh Prabowo dan calon wakilnya, Sandiaga Salahudin Uno.³

Pertarungan politis antara Jokowi dan Prabowo yang terasa seperti “*rematch*” menjadi semakin seru karena masing-masing kubu mengklaim mendapat dukungan dari warga NU. Di pihak Jokowi, secara gamblang, didukung oleh Ma'ruf Amin yang pernah menjabat sebagai Rais Am Pengurus Besar NU (PBNU). Meskipun demikian, ketika menyisihkan Mahfud MD dalam perebutan posisi cawapres, manuver politik yang dimainkan oleh sang kiai tersebut justru membuat sebagian warga nahdliyin kurang simpatik. Sementara di pihak Prabowo, walaupun tidak mengambil figur ulama sebagai cawapres, kubu ini tetap memperoleh dukungan dari para ustaz, alim, dan kiai yang tergabung dalam Ijtima' Ulama. Termasuk di dalamnya ada nama-nama kiai NU, meskipun tidak memiliki jabatan pada level struktural di lingkungan PBNU.

Hal tersebut memunculkan deretan panjang pertanyaan: bagaimana peta sikap warga nahdliyin saat menghadapi Pilpres 2019 silam? Apakah terjadi keterbelahan suara dan dukungan dari warga nahdliyin karena perbedaan sikap politis di level para kiai dan ulama yang menjadi panutan mereka? Bagaimana arah preferensi warga NU dalam memilih capres dan cawapres pada pemilu 2019?

Artikel yang bersifat kualitatif ini mendeskripsikan data-data mutakhir dari berbagai surat kabar *online* dan buku-buku pustaka, terutama karya Greg Fealy,⁴ untuk mengkaji: (1) dinamika politik NU dan sikap warga nahdliyin dalam Pilpres 2019. Dalam konteks ini, akan ditelusuri latar historis sikap politik NU sejak era pra dan pasca reformasi, (2) dinamika politik NU apabila dikaitkan dengan khittah 1926, (3) sikap politik kiai NU, baik dari level struktural maupun non-struktural, dan (4) arah dukungan warga nahdliyin kepada tiap-tiap calon presiden dan wakil presiden.

² “Jokowi Pilih Ma'ruf Amin sebagai Cawapres di Pemilu 2019.” <https://nasional.tempo.co/read/1115535/jokowi-pilih-maruf-amin-sebagai-cawapres>. Diakses pada Kamis, 9 Agustus 2018, jam 22.10 WIB.

³ “Kiai dan Warga NU Janjikan 60 Persen Suara untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.” <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/02/kiai-dan-warga-nu-janjikan-60-persen-suara-untuk-prabowo-subianto-sandiaga-uno-di-pilpres-2019>. Diakses pada Ahad, 2 Desember 2018, jam 15.35 WIB. Lihat juga, “Bertemu Prabowo-Sandiaga, Keluarga Pendiri NU Nyatakan Dukungan,” <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/29/05050081/bertemu-prabowo-sandiaga-keluarga-pendiri-nu-nyatakan-dukkungan>. Diakses pada Selasa, 18 Desember 2018, jam 15.20 WIB.

⁴ Di antara karya Greg Fealy adalah *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS, 2009); dan yang ditulis bersama Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

¹ Kalau jumlah penduduk Muslim Indonesia kita asumsikan mencapai 200 juta, dan 50 %-nya tergabung dalam NU, maka berarti jumlah warga NU di Indonesia tidak kurang dari 100 juta penduduk, sebuah angka yang cukup fantastis untuk ukuran sebuah organisasi kemasyarakatan. Muhammad In'am Esha, “Pengantar Editor,” dalam Muhammad In'am Esha, NU di Tengah Globalisasi: Kritik, Solusi, dan Aksi (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. ix.

B. Sejarah Sikap Politik NU Pra-Reformasi

NU merupakan organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh para ulama atas prakarsa KH. Hasyim Asy'ari. NU didirikan sebagai wadah untuk mempersatukan diri dan langkah dalam memelihara, melestarikan, mengemban, dan mengamalkan ajaran Islam yang mengikuti salah satu dari empat mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (*Islam rahmatan lil 'alamin*), dengan tetap berpegang teguh pada ajaran *ahlus sunnah wal jama'ah*.

Mula-mula, NU membatasi gerakannya pada kegiatan dakwah dan pendidikan keagamaan yang media penyampaiannya terfokus melalui pesantren, masjid, musala, dan surau. Keterlibatan NU di luar bidang pendidikan hanya terjadi pada momen-momen kritis tertentu. Semisal, ketika penyerangan penjajah terhadap masyarakat. Dalam konteks perjuangan melawan penjajah, melalui resolusi jihadnya, KH. Hasyim Asy'ari memberikan instruksi kepada para santri dan masyarakat umum agar berjihad memerangi orang-orang yang berupaya merenggut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah Indonesia merdeka, dalam banyak kesempatan, NU juga turut mengisi kemerdekaan dengan menempatkan beberapa tokohnya dalam posisi penting di level ketatanegaraan, seperti yang dilakukan oleh KH. Wahid Hasyim dan KH. Bisri Syamsuri. Kesadaran berpolitik seperti ini secara tidak langsung telah mengantarkan NU yang berorientasi pada kegiatan sosial keagamaan dan budaya, bertransformasi menjadi organisasi keagamaan yang juga menjalankan fungsi politik.⁵

Pergulatan politik NU menjadi semakin nyata pada muktamar NU ke-16 yang diselenggarakan di Purwokerto. Pada momen tersebut, secara resmi organisasi ini mendorong anggotanya untuk masuk ke dalam partai politik Masyumi searah dengan berubahnya Masyumi sebagai partai politik pada tahun 1945. Bahkan, tiga anggota NU kemudian menduduki jabatan menteri sebagai wakil Masyumi dalam Kabinet Revolusi, yaitu Wahid Hasyim yang dua kali menjabat Menteri Negara dan dua kali menjabat Menteri Agama; Masjkur dan KH. Fathurrahman Kafrawi yang menjabat sebagai Menteri

Agama. Di samping itu, Presiden Soekarno pernah mengangkat KH. Wahab Hasbullah menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).⁶

Namun, dalam perjalanannya, hubungan antara pembesar NU dengan tokoh ormas lainnya yang ikut tergabung dalam Masyumi mengalami gesekan. Maka, dalam muktamarnya ke-19 di Palembang, April 1952, NU menyatakan diri sebagai partai politik independen, keluar dari Masyumi. Melalui langkah KH. Abdul Wahab Hasbullah, muktamar lantas mengajak kaum nahdliyin menyepakati keputusan itu. Muktamar Palembang juga menegaskan asas dan tujuan partai NU yang lebih kurang diambil dari visi misi NU sebagai ormas Islam, yaitu menegakkan syariat Islam dengan berhaluan pada salah satu dari empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang berideologi *ahlus sunah wal jama'ah*, selain juga melaksanakan hukum-hukum Islam dalam masyarakat.⁷

Dalam pandangan Deliar Noer, keluarnya NU dari Masyumi merupakan puncak ketidakserasian antara kedua organisasi itu yang telah mulai terlihat sejak Kongres Masyumi di Yogyakarta pada bulan Desember 1949. Menurut sebagian elite NU, ada sejumlah oknum peserta kongres yang mulai tidak memperlihatkan rasa hormatnya kepada para ulama/kiai. Oknum peserta ini juga membanding-bandingkan bahwa lulusan sekolah Belanda lebih superior daripada lulusan sekolah agama. Hal ini sukar ditoleransi oleh kalangan santri yang berbasis NU.⁸

Pertama kali kiai NU terjun ke politik praktis adalah pada saat NU menyatakan memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955 sebagai salah satu partai peserta pemilu. Pada pemilu Desember 1955, terjadi peningkatan signifikan di mana NU meraih 45 kursi di parlemen, padahal sebelumnya hanya 8 kursi. Banyaknya jumlah kursi yang didapat menunjukkan kekuatan NU yang semakin menguat semenjak keluar dari Masyumi. Hal ini sekaligus mengindikasikan NU memiliki kekuatan untuk ikut mengatur kendali politik nasional.⁹

Setelah Soekarno jatuh dan diganti oleh pemerintahan Orde Baru, NU kehilangan jabatan di Departemen Agama, padahal sebelumnya selalu dijabat oleh orang NU. Tidak hanya itu, NU juga dikejutkan oleh kebijakan penggabungan partai-partai secara paksa. Pada tahun 1973 pemerintah membuat kebijakan restrukturisasi partai politik berdasarkan kelompok

⁶ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 53-54.

⁷ Andree Feillard, *NU Vis-a-vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 45-46.

⁸ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1987), hlm. 87.

⁹ Arif Hidayatullah & M. Ali Haidar, *Depolitisasi...*, hlm. 518.

⁵ Arif Hidayatullah & M. Ali Haidar, "Depolitisasi Nahdhatul Ulama 1968-1983", *Avatara: e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, Volume 2 No. 3, Oktober 2014, hlm. 518.

ideologis dari 9 partai menjadi 2 partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).¹⁰

Gagasan penyederhanaan ini diawali dengan pengelompokan partai dalam parlemen. Pemerintah menyarankan pembentukan berdasarkan dua kelompok: (1) kelompok materiel-spiritual, terdiri atas partai-partai yang menekankan pembangunan materiel tanpa mengabaikan aspek spiritual, yang terdiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Murba, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo); (2) kelompok spiritual-materiel, menekankan pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek materiel, terdiri atas NU, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII), dan Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti).¹¹ Pengelompokan partai berlanjut dengan fusi partai politik. Pada tanggal 5 Januari 1973, empat partai politik Islam, yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada tanggal 10 Januari 1973, PNI, Partai Katolik, Partai Murba, Parkindo, dan IPKI berfusi dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).¹²

Bagi umat Islam, fusi partai politik tersebut mempunyai dua makna: (1) sebagai akhir sejarah panjang peranan parpol-parpol Islam, atau (2) sebagai awal persatuan partai politik Islam. Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia partai politik Islam bisa bersatu dalam satu wadah organisasi.¹³ Dalam perkembangannya, PPP termasuk partai politik yang tetap mempertahankan asas Islam sebagai landasan filosofis. Dalam fusi partai-partai Islam ini, NU merupakan partai yang memiliki massa yang jauh lebih besar daripada partai-partai yang lain. Dua di antaranya ialah *partner* dalam Liga Muslim, yaitu PSII dan Perti. Kedua partai ini sangat kecil. Satu-satunya *partner* signifikan NU di PPP adalah Parmusi. Berdasarkan hasil pemilu pada tahun 1971, Parmusi mendapat 24 kursi di DPR, sementara NU 58, PSII 10 kursi dan Perti 2 kursi.¹⁴

Terlepas dari banyaknya jumlah kursi anggota dewan yang berhasil didapatkan di Senayan, bagi NU, peleburan ke dalam PPP seperti kembali ke masa di mana ia menjadi bagian dari Masyumi. Dapat diramalkan, sebagian problem dan konflik muncul kembali ke permukaan, kecuali seandainya

ketimpangan antara kekuatan massa pendukung yang besar dan jumlah politisi yang berkeahlian dapat diatasi dengan baik. Meski demikian, posisi awal NU masih lebih baik karena NU merupakan kelompok dominan dalam PPP.¹⁵

Pada awal-awal pemilu, PPP mampu menunjukkan jati dirinya sebagai partai Islam yang memiliki banyak pendukung. Ini dikarenakan adanya dukungan oleh para ulama dan kiai, dan merupakan hasil dari perjuangan para anggota dan kader PPP. Ini dapat dilihat pada pemilu 1977 di mana PPP mampu memperoleh Suara 26,29% dan Golkar sebagai partai pemerintah memperoleh suara 62,11%. Pada pemilu 1982, suara PPP mengalami kenaikan dengan jumlah 27,78%, sedangkan Golkar 64,34%.¹⁶

Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari peranan partai-partai Islam yang tergabung dalam fusi, tidak terkecuali NU. NU memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perolehan suara PPP pada waktu itu, mengingat bahwa NU sendiri merupakan organisasi yang mempunyai pengikut dalam jumlah yang sangat besar, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan masuknya NU ke dalam fusi, dan secara formal terikat dengan PPP, maka warga NU menyalurkan aspirasi politiknya melalui PPP.¹⁷

Dalam wadah politik PPP ini pula, kekuatan politik Islam mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah. Hal tersebut tampak dari sikap politiknya yang menolak melegitimasi eksistensi dan hak hidup aliran kepercayaan di Indonesia dan ratifikasi Undang-Undang Pemilu 1980 yang diajukan oleh pemerintah.¹⁸ Tetapi, akibat dari sikap tanpa kompromi dari PPP, pemerintah justru kian menaikkan derajat intervensinya dengan menciptakan konflik internal di tubuh PPP yang berujung pada hengkangnya NU. Tekanan berkepanjangan yang merugikan politik NU, ditambah suasana tidak kondusif di tubuh PPP sendiri, maka secara kelembagaan NU menyatakan tidak lagi berfusi dengan PPP dalam Muktamarnya di Situbondo tahun 1984.¹⁹ Inilah politik monumental NU yang dikenal dalam sejarah dengan istilah “kembali ke khittah 1926”. Khittah NU 1926 ini sering dinilai sebagai titik awal NU untuk menjadi kekuatan politik netral dalam politik kepartaian.²⁰ Dengan keluarnya NU dari keanggotaan PPP, maka secara organisatoris NU

¹⁰ Andree Feillard, *NU...*, hlm. 171.

¹¹ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 235.

¹² *Ibid.*

¹³ Syamsuddin Haris, *Partai Persatuan Pembangunan, Politik Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 1991), hlm, 148.

¹⁴ Moh. Attamami Islah & M. Ali Haidar, “Dukungan Suara NU dalam Kemenangan Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 1977–1982 di Kabupaten Gresik”, *Avatara: e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, Volume 2 No. 2, Juni 2014, hlm. 3.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Andree Feillard, *NU...*, hlm. 214–220.

¹⁹ Elly Herlyana, “Gerakan Islam Politik: Angan-angan Persatuan dan Keterpecahan”, *Jurnal Sosio-Religia*, Volume 7 Nomor 3, Mei 2008, hlm. 819.

²⁰ *Ibid.*

tidak terikat dengan partai politik mana pun, dan kembali kepada jati dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan, seperti pada awal pembentukannya.²¹

C. Konfigurasi Politik NU Pasca Reformasi

Peristiwa lengsernya Presiden Soeharto dan berakhirnya Orde Baru yang telah lama berkuasa dalam kurun waktu lebih kurang 32 tahun menjadi momentum penting atas munculnya gagasan pendirian partai politik baru NU. Warga NU di berbagai penjuru Nusantara banyak mengirimkan usulan ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berisi agar NU mendirikan partai baru sebagai wadah bagi warga nahdliyin dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Tidak mudah untuk mendirikan partai tunggal yang akan menjadi kendaraan politik yang ideal bagi sebagian besar warga NU. Cukup banyak yang mengusulkan NU kembali menjadi partai. Realitas politik menunjukkan bahwa sejumlah warga NU masih menjadi anggota, aktivis, dan pimpinan di PPP. Sedikit lebih kecil jumlahnya masih aktif di Golkar, khususnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya.²²

Pertemuan terakhir dalam proses pembentukan partai warga NU di Bandung memberi alternatif tiga nama, yaitu Partai Nahdlatul Ummat, Partai Kebangkitan Umat dan Partai Kebangkitan Nasional. Namun, tiga nama tersebut tidak diambil oleh KH. Abdurrahman Wahid yang lalu memilih sendiri nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pertemuan di Bandung itu juga masih menunjukkan nuansa keislaman di dalam partai yang akan dibentuk. Tetapi, nuansa keislaman itu dikurangi secara berarti dengan tujuan membuat PKB bercitra diri sebagai partai kebangsaan dan partai yang terbuka.²³

Cita-cita dan visi partai ini dapat dilihat dari bagian terakhir isi deklarasi yang disampaikan oleh para deklarator yang beranggotakan para kiai sepuh karismatik, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muchith Muzadi.²⁴ Bagian terakhir deklarasi tersebut berbunyi:

"Bahwa perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut menghendaki tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih dan tepercaya, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan lestariya lingkungan hidup bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya wahana perjuangan yang kuat, mampu menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara dengan berakhlakul karimah. Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, didirikanlah PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang bersifat kebangsaan, demokratis, dan terbuka."²⁵

PKB pun dinyatakan secara resmi berdiri pada tanggal 23 Juli 1998 di Jakarta. Setahun berselang, pada pemilu 1999 PKB mendapat dukungan yang cukup signifikan dari rakyat. Partai ini berhasil menempati urutan ketiga perolehan suara pada tingkat nasional dengan jumlah pemilih sebanyak 13.336.982 orang (12,6%). PKB hanya kalah dari PDIP dan Golkar yang masing-masing meraih posisi pertama dan kedua. Meski demikian, dalam perolehan kursi DPR RI, PKB menduduki peringkat keempat dengan 51 kursi, di bawah PPP yang meraih 58 kursi.²⁶

Partai baru yang menjadi kendaraan politik warga NU inilah yang kemudian mampu mengantarkan pimpinannya, Abdurrahman Wahid, menjadi Presiden Republik Indonesia setelah B.J. Habibie.²⁷ Walau demikian,

²⁵ pkb.id/page/naskah-deklarasi/ diakses pada Rabu, 28 November 2018 pada jam 11.31 WIB.

²⁶ Ichwan Arifin, *Kiai dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang*, Tesis (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 21.

²⁷ Pada 1998, kekuatan nasionalis-sekuler yang selama pemerintahan Orde Baru mengalami tindakan represif kemudian bangkit. Megawati, yang sejak pertengahan 1990-an memobilisasi gerakan perlawanan terhadap Orde Baru, kemudian mendirikan PDI Perjuangan. Pada Pemilu 1999, PDIP di bawah komando Megawati langsung mendapatkan suara 34 % dan memenangkan pemilu pada saat itu. Partai Golkar yang menjadi pesakitan selama aksi reformasi, ternyata masih mendapatkan kepercayaan dari pemilih dan menduduki peringkat kedua dalam pemilu, yaitu dengan 4,22% suara. Sementara partai-partai Islam marak bermunculan. Di antara yang utama adalah PPP, PAN, PKB, PBB, dan PK (kemudian menjadi PKS). Meski meraih status sebagai pemenang pemilu, PDIP gagal menempatkan ketua umumnya, Megawati, sebagai presiden. Hal tersebut disebabkan sejumlah partai Islam yang didukung oleh Partai Golkar menggalang kekuatan bersama yang mengusung Abdurrahman Wahid, dari PKB, sebagai presiden. Megawati kemudian didaulat menjadi wakil presiden. Alasan penjegalan Megawati bernuansa agama. PPP mengatakan bahwa presiden dari kalangan perempuan tidak dapat diterima dalam ajaran Islam. Sebab, dalam hadits dikatakan bahwa pemimpin laki-laki harus diutamakan. Tetapi, di balik itu, kekhawatiran munculnya kekuatan kiri seiring berkuasanya PDIP juga menjadi alasan kuat. Sejak tahun 1994, terdapat tuduhan kepada Megawati bahwa partai PDI telah diinfiltrasi oleh elemen-elemen komunis. Lihat Stephen Eklof, *Power and Political*

²¹ Moh. Attamami Islah & M. Ali Haidar, *"Dukungan..."*, hlm. 4.

²² Salahuddin Wahid, *Menggagas Peran Politik NU* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), hlm. 65.

²³ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁴ Moch. Eksan, *Kiai Kelana: Biografi Kiai Muchith Muzadi* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2000), hlm. 162.

masa kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ironisnya, ia justru digulingkan oleh sebagian besar pendukungnya di pemilihan presiden 1999. Di antara penyebabnya ialah dugaan skandal Bulog yang melibatkan Gus Dur. Namun, selain itu, faktor politis diduga menjadi penyebab utamanya, yaitu ketidaksinkronan Gus Dur dengan berbagai komponen pendukungnya yang sudah tidak dapat diatasi lagi.²⁸

Ketidakharmonisan itu muncul karena Gus Dur berniat membuka jalan diplomasi dengan Israel dan mengusulkan untuk menghapus Tap MPRS XXV tahun 1966 tentang pelarangan ajaran komunisme dan marxisme. Kedua langkah tersebut ditentang oleh kalangan Islam. Sementara itu, partai-partai lainnya merasa gerah dengan beberapa kebijakan pemerintahan Gus Dur yang mengabaikan kepentingan politik mereka. Setelah sekitar 1 tahun 6 bulan berkuasa, Gus Dur dijatuhkan melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Posisi presiden kemudian dijabat oleh Megawati dan wakil presidennya adalah Hamzah Haz, dari PPP, yang sebelumnya amat menentang pencalonan Megawati dengan alasan teologisnya. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa isu agama masih menjadi faktor penting dalam friksi politik yang mendorong pergantian rezim.²⁹ Jatuhnya Gus Dur membawa efek yang besar bagi kalangan pengikutnya, termasuk bagi PKB. Kader partai itu sempat mengalami krisis kepercayaan. Di lembaga legislatif, PKB bahkan sempat menyatakan membekukan diri. Bagi para pendukung Gus Dur, perlu waktu lama untuk menerima kenyataan politik bahwa sosok yang menjadi ikon PKB dan NU itu harus mengalami tragedi politik yang pahit.³⁰

Pasca lengsernya Gus Dur, PKB mengalami konflik internal yang cukup pelik. Dalam skala nasional, konflik pertama muncul melalui perpecahan antara Gus Dur dengan Mathori Abdul Djalil. Pemakzulan Gus Dur dari jabatan presiden, menjadi pemicu munculnya konflik internal. Mathori sebagai Ketua Umum DPP PKB waktu itu dianggap mengkhianati garis politik partai dan lebih mendukung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri, yang kemudian menggantikan Gus Dur menjadi Presiden RI. Kemudian, konflik semakin melebar dengan munculnya kepengurusan ganda

versi Mathori dan versi Gus Dur. Beruntung, konflik ini tidak berlangsung lama. Seusai peradilan memutuskan PKB pimpinan Gus Dur yang sah di mata hukum, konflik itu pun berakhir.³¹

Namun, imbas konflik itu membuat citra PKB menjadi sangat buruk. Partai yang dipenuhi tokoh-tokoh spiritual dan menjadi panutan masyarakat ternyata justru saling berseteru satu sama lain untuk urusan-urusan yang bersifat materialistik. Apalagi banyak politisi dan kader PKB yang terjerat kasus korupsi sehingga slogan “membela yang benar” sering diplesetkan menjadi “membela yang bayar”. Sebuah stigmatisasi yang berdampak luar biasa bagi rusaknya citra PKB.³² Akibatnya, pada Pemilu 2004, partai yang kemudian dipimpin Alwi Shihab itu hanya memperoleh hasil suara 10,57% (11.989.564) dan mendapatkan 52 kursi di DPR.³³ Dengan kata lain, suara PKB mengalami penurunan sebanyak 1.347.418.

Citra itu semakin memburuk lagi setelah munculnya konflik baru yang berujung pada perpecahan pasca Muktamar II PKB di Semarang pada tahun 2004. Konflik ini muncul setelah Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf yang saat itu merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB diberhentikan dari jabatannya setelah diangkat menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Imbas dari konflik di Muktamar II Semarang membuat PKB terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Gus Dur-Muhaimin Iskandar berhadapan dengan Alwi Shihab-Saifullah Yusuf.³⁴ Perolehan suara PKB lantas merosot tajam pada Pemilu 2009 dan hanya mendapat 27 kursi di DPR.³⁵

Penyusutan jumlah kursi ini merupakan konsekuensi atas carut marutnya kondisi partai. Padahal, jika melihat basis massa Nahdhiyyin yang mencapai puluhan juta, partai ini semestinya mampu meraup kursi DPR cukup banyak. Dari sinilah muncul kegamangan sikap politik warga NU yang akhirnya tidak fokus pada satu pilihan partai saja, PKB, melainkan beralih ke partai-partai lain yang dianggap kompeten dan amanah.

Culture in Suharto's Indonesia: The Indonesian Democratic Party (PDI) and the Decline of the New Order (1986-98) (London: Routledge, 2004).

²⁸ Ari Ganjar Herdiansah, dkk, “Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014”, *Jurnal Wacana Politik*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 65.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ichwan Arifin, *Kiai...*, hlm. 21.

³¹ *Ibid.*, hlm. 22–23.

³² *Ibid.*, hlm. 23.

³³ nasional.kompas.com/read/2018/02/21/06041501/pkb-sejarah-dan-kiprahnya-di-lima-kali-pemilu Diakses pada Rabu, 28 November 2018 pada jam 11.50 WIB.

³⁴ Ichwan Arifin, *Kiai...*, hlm. 24.

³⁵ nasional.kompas.com/read/2018/02/21/06041501/pkb-sejarah-dan-kiprahnya-di-lima-kali-pemilu, diakses pada Rabu, 28 November 2018 pada jam 11.50 WIB.

D. Kontestasi Kiai dan Tokoh Nahdliyin sebagai Politisi

Secara kumulatif, warga nahdliyin tidak benar-benar memberikan dukungan pada satu partai tertentu, misal PKB, meskipun dari segi sejarah, keberadaan PKB ini berdiri atas prakarsa para kiai sepuh NU. Pasca konflik internal PKB, preferensi warga NU dalam berpolitik lebih mengarah pada sisi personal pihak yang berlatar belakang NU, bukan lagi pada ranah partai. Gejala ini mulai muncul semenjak Pemilu 2004, di mana terjadi “pertarungan” beberapa kiai dan tokoh NU dalam kontestasi politik. Pada putaran pertama terdapat lima pasang calon, yaitu Wiranto-Salahuddin Wahid (Partai Golkar), Megawati-Hasyim Muzadi (PDIP), Amin Rais-Siswono (PAN), Yudhoyono-Jusuf Kalla (Partai Demokrat, PBB, PKPI), dan Hamzah Haz-Agung Gumelar (PPP).³⁶

Pada putaran pertama, pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim Muzadi mengungguli kandidat-kandidat lainnya dengan suara 33,57% dan 26,62%.³⁷ Menjelang putaran kedua, terjadi pengelompokan partai pendukung pada kedua kandidat. Pada barisan Megawati-Hasyim Muzadi terdapat PDIP, Partai Golkar, PPP, PBR, PDS, PNI Marhaenisme, PKPB dengan total suara 54,75%. Sementara Yudhoyono-Jusuf Kalla hanya mendapatkan tambahan dukungan dari PKS. Meskipun PKB dan PAN tidak menyatakan dukungan secara resmi, tetapi suara mereka mengalir ke Yudhoyono-Jusuf Kalla.³⁸

Meskipun Megawati berupaya mendapatkan dukungan dari kalangan Islam tradisional dengan menggandeng Hasyim Muzadi, tokoh NU, sebagai kandidat wakil presiden, namun dukungan NU terpecah setelah Gus Dur memerintahkan anak-anak perempuannya menemani Yudhoyono berkunjung ke beberapa pesantren besar. Di sisi lain, berdasarkan hasil *polling*, pasangan Megawati-Hasyim Muzadi kurang memungkinkan memenangkan pemilu. Watak golongan NU yang pragmatis dan lebih memilih di pihak yang paling berpeluang menang telah mengalirkan dukungan pemilih muslim tradisional kepada Yudhoyono.³⁹ Dengan dukungan dari basis massa PAN dan PKS, Yudhoyono berhasil menyatukan basis dukungan muslim tradisional dan modernis yang turut mengantarkannya memenangkan

pemilu dengan raihan 60,62% suara. Yudhoyono-Jusuf Kalla kemudian membangun pemerintahan yang terdiri dari hampir semua partai besar dan menengah, kecuali PDIP.⁴⁰

Menjelang pemilu 2009, popularitas dan elektabilitas Yudhoyono masih tidak tertandingi. Ia menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk menjadi bagian pendukungnya. Yudhoyono berpasangan dengan Budiono yang didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PKB, PKNU, PPP dan PBB. Sementara dua pasangan kandidat lainnya, yaitu Megawati-Prabowo diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra, sedangkan Jusuf Kalla-Wiranto diusung oleh Partai Golkar, PAN, dan Hanura.⁴¹

Menariknya, sebagian besar partai-partai Islam berada di barisan Yudhoyono- Budiono yang kemudian memenangkan pemilu dengan suara 60,8%. Namun, hasil tersebut sama sekali tidak menandakan daya tarik partai-partai Islam pada ajang pemilu 2009. Sebaliknya, suara partai-partai Islam dalam pemilu legislatif 2009 justru mengalami penurunan, yaitu menjadi 29% dari 37% di pemilu sebelumnya. Faktor utama kemenangan Yudhoyono-Budiono adalah elektabilitas Yudhoyono yang kokoh di berbagai *polling*.⁴²

Menurut Aspinall, kemunduran elektoral partai-partai Islam dalam pemilu 2009 menandakan lunturnya politik aliran. Menguatnya peran media massa dan model-model kampanye yang modern dan kreatif melemahkan perilaku pemilih berdasarkan identitas kolektif. Partai-partai dengan citra identitas kolektif yang kuat, seperti PDIP dan PKB, mengalami penurunan suara yang drastis. Indikasi lain melemahnya politik aliran adalah berhasilnya partai-partai yang menggunakan pesona personal yang kuat, seperti Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Periode 2009 menunjukkan kebangkitan pola pemilih individual yang merujuk pada karakter kandidat.⁴³

Namun, politik aliran bukan berarti tidak lagi berlaku, setidaknya di basis massa. Sikap bersahabat Yudhoyono terhadap partai-partai Islam dan ormas-ormas Islam menunjukkan bahwa politik aliran masih dianggap sebagai variabel penting dalam menjaga keseimbangan dukungan politik terhadap pemerintah. Bertahannya PDIP sebagai partai non-pemerintah dan cenderung bersikap sebagai partai oposisi memberikan dampak menguatnya kembali tanda-tanda politik aliran jelang pemilu 2014.⁴⁴

³⁶ F. X. Baskara Tulus Wardaya, *Membongkar Supersemar: dari CIA hingga kudeta merangkap melawan Bung Karno* (Yogyakarta: Galangpress, 2009), hlm. 212.

³⁷ Jumlah suara yang berhasil diraup oleh SBY-JK adalah 39.838.184 dan urutan kedua ditempati oleh pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dengan 31.569.104 suara.

³⁸ Pusat Penelitian Politik LIPI, *Year Book 2004: Quo Vadis Politik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

³⁹ Marcus Mietzner, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation* (Institute of Southeast Asian Studies, 2009), hlm. 279.

⁴⁰ Ari Ganjar Herdiansah, dkk., *“Pembelahan...”*, hlm. 66.

⁴¹ Firmanzah, *Mengelola Partai politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

⁴² *Ibid.*

⁴³ Edward Aspinall, *“Indonesia...”*, hlm. 103–125.

⁴⁴ Ari Ganjar Herdiansah, dkk., *“Pembelahan...”* hlm. 66.

Menjelang Pilpres 2014, PDIP mengusung Jokowi Widodo yang dipasangkan dengan Jusuf Kalla. Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla diusung oleh PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, dan PKPI. Jokowi yang pernah menjadi wali kota Solo selama dua periode dan Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun memiliki elektabilitas yang mengungguli tokoh-tokoh nasional, mulai dari Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar), Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra), dan bahkan Megawati (Ketua Umum PDIP). Di pihak lain, pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, dan sebagian besar partai Islam, yaitu PAN, PKS, PPP, dan PBB. Secara garis besar, basis pendukung Prabowo-Hatta terdiri dari kalangan agamis yang konservatif. Partai Golkar pun banyak didukung oleh kalangan agamis.⁴⁵

Nuansa Islami pada kubu Prabowo-Hatta semakin kentara apabila melihat histori biografi Prabowo yang dikenal sebagai tentara yang agamis atau TNI hijau. Ia dikenal sebagai tokoh TNI yang dekat dengan tokoh-tokoh Islam, seperti dari Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Sementara Hatta Rajasa merupakan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dari Palembang, Sumatera Selatan. Dari posisinya sebagai ketua umum PAN pada saat itu ditambah dengan berasal dari tokoh ICMI membuat Hatta mendapat dukungan secara penuh dari organisasi Islam Muhammadiyah. Di kubu Jokowi-Jusuf Kalla, terdapat PKB sebagai partai Islam dengan basis massa dari nahdliyyin. Jusuf Kalla pun merupakan tokoh Partai Golkar yang dekat dengan kalangan NU. Namun, basis massa dari PDIP dan relawan Jokowi lebih mendominasi saat kampanye Pilpres sehingga *branding image* Jokowi sangat menonjol. Mempertimbangkan konfigurasi basis massa, nuansa pendukung dari kalangan kelompok Islam lebih kuat melekat pada kubu Prabowo-Hatta dibandingkan dengan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla.⁴⁶

Pilpres 2014 kemudian dimenangkan Jokowi-Jusuf Kalla dengan suara 53,15% di atas pasangan Prabowo-Hatta dengan raihan 46,85% suara. Setelah menjalankan roda pemerintahannya, Jokowi-Jusuf Kalla segera melakukan konsolidasi terhadap organisasi-organisasi sipil Islam, terutama NU dan Muhammadiyah. Beberapa kader NU mengisi pos-pos kementerian kabinet Jokowi-JK, seperti Khofifah Indar Parawansa, Lukman Hakim Saifuddin, Marwan Ja'far, Imam Nahrawi, dan Muhammad Hanif Dhakiri. Sementara

kader dari Muhammadiyah yang duduk di kabinet Jokowi adalah Nina Moeloek dan Muhajir Effendy.⁴⁷

E. Garis Kebijakan Politik NU dan Khittah 1926

Terjunnya NU dalam kancah politik, terutama setelah keluar dari Masyumi, telah membawa berbagai perubahan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, tidak bisa dimungkiri, sisi positif itu juga memunculkan eksekusi negatif yang berdampak pada munculnya konflik internal di tubuh NU. Puncaknya adalah serangkaian muktamar NU yang menyuarakan agar NU kembali kepada visi misi awal didirikannya organisasi ini sebagai organisasi sosial keagamaan, bukan politik. Dari sanalah semboyan “kembali ke *khittah* 1926” terlahir.

Dalam konteks tersebut, keputusan NU untuk kembali kepada *khittah* 1926 sebenarnya dapat dibaca sebagai upaya NU untuk menganut cara berpolitik yang berwawasan kebangsaan. Sedangkan warga NU dalam menentukan partai politiknya harus membawa dirinya secara individual sebagai warga negara, dan tidak boleh membawa nama NU secara kelembagaan. NU memberikan kebebasan kepada warganya, termasuk para kiai, untuk menyalurkan aspirasi politik mereka ke partai politik mana saja yang mereka pilih.⁴⁸

Kembalinya NU ke *khittah* 1926, yang diputuskan melalui Munas Alim Ulama NU No. II/MAUNU/1404/1983, dan dikuatkan lagi dalam hasil keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo XXVII No. 02/MNU/27/1984, dipicu oleh carut-marutnya etika politik yang dimainkan kiai-kiai dan tokoh-tokoh NU. Intinya adalah mengembalikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan tidak terkait sedikit pun dengan organisasi sosial politik (orsospol).

Selanjutnya, dalam Muktamar NU XVIII di Krapyak, Yogyakarta, tahun 1989, dirumuskan pedoman berpolitik warga NU:⁴⁹

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

⁴⁸ Faisal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 26.

⁴⁹ Majma' Buhuts an-Nahdliyyah, *Khittah & Khidmah: Kumpulan Tulisan Majma' Buhuts an-Nahdliyyah (Forum Kajian Ke-NU-an)* (Pati: Majma' Buhuts an-Nahdliyyah Roudloh Al-Thohiriah, 2014), hlm. 51–52.

⁴⁵ Ari Ganjar Herdiansah, *Paradoks Koalisi Tanpa Syarat: Suatu Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Politik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

⁴⁶ Ari Ganjar Herdiansah, dkk., *Pembelahan...*, hlm. 66.

2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.
3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembanaan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan *akhlakul karimah* sebagai pengamalan ajaran Islam *ahlus sunnah wal jama'ah*.
7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apa pun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah-belah persatuan.
8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, *tawadlu'*, dan saling menghargai satu sama lain sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Abdul Muchith Muzadi menjelaskan maksud dan tujuan NU kembali ke khittah 1926 sebagai berikut: (1) untuk memulihkan kedudukan NU dan ulama menjadi panutan semua lapisan kaum muslim *ahlus sunnah wal jama'ah*; (2) untuk melepaskan NU dari keterikatan dengan politik praktis, agar mampu menggarap program-program yang bermanfaat bagi agama, kaum nahdliyin, dan masyarakat; dan (3) untuk menegaskan hakikat identitas NU dan konsekuensinya.⁵⁰

Dengan demikian, kembalinya jati diri NU sebagai organisasi sosial keagamaan merupakan suatu upaya untuk menjaga *muru'ah* para kyai dan ulama dari hal-hal materialistik yang muncul akibat politik praktis sehingga sosok kiai yang selama ini dihormati dan diikuti petuahnya tetap memiliki kewibawaan dan dapat dijadikan teladan yang baik (*uswah hasanah*) bagi umat.

F. Dinamika Politik NU terhadap Garis Kebijakan NU

Dalam pandangan Warid, perilaku politik NU, khususnya para kiainya, mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Pergeseran sikap tersebut dikategorikan ke dalam empat masa penting, antara lain: (1) masa kolonial (politik kebangsaan), (2) 1955–1982 (politik kekuasaan), (3) 1985–1998 (politik kebangsaan), dan era reformasi (politik kekuasaan-kebangsaan).⁵¹ Dari sini tampak jelas bahwa terdapat dua jenis laku politik yang diambil oleh para pimpinan NU, yaitu politik kebangsaan dan politik kekuasaan. Politik kebangsaan di masa kolonial lahir sebagai sebuah refleksi dan kepedulian terhadap nasib bangsa yang ditindas penjajah. Semangat yang dimunculkan adalah untuk membawa negara ini menuju kemerdekaan sehingga keadilan dan kesejahteraan rakyat bisa terpenuhi dengan baik. Juga untuk menjaga hak-hak dalam menjalankan ajaran agama. Dua nilai dan semangat inilah yang sejalan dengan tujuan politik Islam, yakni *hirâsat ad-dîn wa siyâsat ad-dunyâ*.

Dalam pandangan Warid, terjunnya NU ke dunia politik (bukan politik praktis), pada masa kolonial merupakan kewajiban agama. Sebab, penjajahan pada waktu itu telah menginjak-injak martabat bangsa Indonesia. Inilah yang dimaksud politik kebangsaan yang pernah dimainkan para kiai NU, yaitu

⁵⁰ Abdul Muchith Muzadi, "Masa-masa Ujian Berat bagi NU", *Aula*, No. 11, November 1995.

⁵¹ Achmad Warid, "Fiqih Politik NU: Studi Pergeseran dari Politik Kebangsaan ke Politik Kekuasaan", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Volume 43 Nomor 1, 2009, hlm. 213.

membela negara dari kekejaman penjajahan.⁵² Namun, ketika kemerdekaan telah diraih dan muncul banyak partai, khususnya Masyumi yang dinilai gagal mewakili kalangan NU dalam berdemokrasi, maka NU pun memutuskan untuk terjun secara total sebagai partai politik yang baru. Terlepas dari berbagai kepentingan yang melatarbelakangi pendirian partai tersebut, pada konteks ini, NU berusaha untuk memperjuangkan ajaran *ahlussunnah wal jama'ah* pada level yang lebih tinggi. Para petinggi NU menghendaki agar konsep Islam inklusif yang diusung NU bukan hanya dijalankan pada tingkatan fatwa, melainkan dilegitimasi pula melalui peraturan perundang-undangan.

Sayangnya, karena kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengharuskan fusi partai Islam ke dalam PPP, NU “terpaksa” masuk ke dalam bagian partai ini. Dari sini permasalahan timbul. Konflik internal yang acap kali muncul di tubuh PPP, membuat para kiai NU menyampaikan gagasan untuk mengembalikan NU kepada *khittah* awal pendiriannya. Walhasil, dalam beberapa muktamar, diusulkan pada forum supaya NU tidak lagi terjun di politik praktis. Puncaknya, dalam muktamar Situbondo, *muktamirin* menyepakati bahwa NU tidak lagi berkacah di dunia politik kekuasaan dan murni menjadi organisasi sosial yang fokus kepada pendidikan-keagamaan-kemasyarakatan.

Walaupun telah berubah haluan, dari partai politik kembali lagi menjadi ormas Islam, ternyata persoalan tidak selesai begitu saja. Pasca turunnya NU dari kancah politik, justru pengaruh NU di pemerintahan mulai tampak melemah. Baru pada awal tahun 1990-an, Soeharto mulai menunjukkan perhatian dan keberpihakannya kepada umat Islam, khususnya NU. Meski begitu, kalangan NU tidak serta merta memperoleh keuntungan dari sikap pemerintah yang kian melunak. Oleh karena itu, momentum reformasi tahun 1998 memantik warga NU, khususnya para kyai, untuk mendirikan partai baru, yakni PKB, sebagai corong suara dalam pemerintahan.

Meskipun terlahir dari “rahim” NU, PKB lebih memosisikan diri sebagai partai berideologi kebangsaan. Dalam pandangan penulis, pembentukan PKB ini dilandasi oleh hasrat untuk menyatukan konsep politik kekuasaan dan kebangsaan sekaligus. Karena itu, PKB tidak berdiri dengan mengatasnamakan NU atau tidak menggunakan embel-embel NU. Di satu sisi, cara ini bisa mengakomodir politik kebangsaan NU yang sudah kembali kepada *khittah* 1926 dan “bersumpah” tidak terjun ke politik praktis.

Tetapi, di sisi lain, dalam perjalanan selanjutnya, “warna” NU dalam diri PKB semakin memudar dan aspirasi kalangan nahdliyin tidak sepenuhnya mampu diwakili oleh PKB.

Tak pelak, hingga beberapa pemilihan presiden pasca turunnya Gus Dur dan Megawati, secara organisatoris, NU terlihat relatif netral. Kalaupun ada beberapa kiai yang menyatakan dukungannya kepada salah satu kandidat tertentu, itu merupakan pendapat pribadi yang tidak mewakili NU secara institusi. Begitu pula kiai-kiai dan kalangan nahdliyin yang berkontestasi dalam Pilpres, baik sebagai capres maupun cawapres, mereka maju sebagai pribadi, bukan mengatasnamakan NU. Pada pilpres 2004, terdapat empat tokoh NU yang ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi tersebut, yaitu Salahuddin Wahid yang digandeng Wiranto, Hasyim Muzadi yang maju bersama Megawati, Jusuf Kalla yang digandeng Susilo Bambang Yudhoyono, dan Hamzah Haz bersama Agung Gumelar. Dari keempat nama ini, hanya Hamzah Haz yang maju sebagai calon presiden, sementara tiga lainnya mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden.

Majunya tokoh-tokoh NU dalam kontestasi ini membuat para pimpinan PBNU mengambil sikap netral: tidak menyatakan dukungan resmi kepada salah satu pihak. Hal ini terjadi karena mereka telah memahami bahwa suara warga nahdliyin dapat dipastikan akan terbelah karena banyaknya kiai dan pembesar dengan latar belakang NU yang maju di Pilpres. Karena itu, dengan tidak mengeluarkan pernyataan resmi, PBNU secara tidak langsung telah berkontribusi menjaga keharmonisan warga NU di kalangan *grass root*. Bisa diprediksi, jika PBNU berani menyatakan dukungan ke calon tertentu, akan muncul polemik dan perpecahan di internal warga NU.

Baru pada pemilu 2014, PBNU mulai menunjukkan sikap dan pernyataan terkait dukungannya ke kandidat Joko Widodo-Jusuf Kalla yang waktu itu bertarung melawan Prabowo-Hatta Rajasa. Meski mendapat dukungan dari PBNU, jumlah suara yang berhasil diraih kubu Jokowi pun tidak signifikan dan hanya mengungguli Prabowo dengan persentase kurang dari 5%. Padahal, pihak Jokowi-Jusuf Kalla juga didukung oleh PKB yang notabene lahir dari inisiasi kiai NU. Ini boleh jadi disebabkan adanya dukungan dari banyak partai Islam di kubu Prabowo, yakni PAN, PKS, PPP, dan PBB.

Dukungan PBNU ke kubu Jokowi secara ideologis bisa dimaklumi. Pertarungan di kancah politik praktis antara satu partai dengan partai lainnya tidak hanya berkutat pada perebutan kekuasaan, melainkan juga pengaruh ideologis. Setiap partai memiliki nilai dan ideologi yang ingin diperjuangkan

⁵² *Ibid.*, hlm. 214.

untuk dilegitimasi dalam bentuk regulasi. Pada konteks ini, kubu Prabowo yang didukung partai-partai Islam konservatif hendak ditandingi oleh PBNU yang mengusung ajaran Islam inklusif. Dengan demikian, pilihan dukungan NU kepada Jokowi-Jusuf Kalla bukan sekadar dilandasi motivasi kekuasaan belaka, melainkan terdapat ikhtiar untuk memperjuangkan ajaran Islam *ahlus sunnah wal jama'ah* yang toleran di level pemerintahan.

Lantas, bagaimana sikap NU terkait Pilpres 2019? Apakah pilihan dukungan NU kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden juga didasarkan atas semangat untuk mensyiarkan ajaran Islam ala *ahlus sunnah wal jama'ah* ataukah semata-mata demi perebutan kekuasaan?

G. Sikap Kiai NU dan Arah Preferensi Nahdliyin di Pilpres 2019

Sikap politik NU—yang dalam konteks ini direpresentasikan oleh para pengurus strukturalnya—terus mengalami dinamika, bahkan hingga menjelang Pilpres 2019. Meski pedoman berpolitik warga NU menyuratkan adanya politik kebangsaan, tetapi pada kenyataannya sikap pimpinan NU justru menggiring ke arah politik praktis. Dengan ungkapan lain, NU diarahkan untuk kembali kepada politik kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan para petinggi PBNU ketika pemilihan calon wakil presiden mulai bergulir. Di kubu Jokowi, muncul beberapa nama yang diusulkan, di antaranya Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan Ma'ruf Amin. Dalam sebuah kesempatan, Ketua Umum PDIP, Megawati, bertanya kepada Said Aqil Siradj tentang dukungan resmi dari NU kepada Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Said menjawab bahwa hal itu tidak dilakukan PBNU. Padahal, Cak Imin mendeklarasikan diri telah mendapatkan dukungan dari para kiai NU di Jawa. Di lain kesempatan, saat ditanya tentang status keanggotaan Mahfud MD dalam NU, Said mengatakan bahwa Mahfud bukan anggota NU. Padahal, dari segi struktural, Mahfud menjadi salah satu pengurus, meski bukan di level pusat, PBNU.⁵³ Jawaban Said lantas menuai respons sekaligus kritik dari Mahfud yang saat itu sudah menyatakan siap untuk maju sebagai cawapres Jokowi. Ia bahkan sudah dihubungi pihak Istana

Negara agar bersiap melakukan pengukuran baju untuk dikenakan pada saat konferensi pers.⁵⁴

Pada sisi lain, Mahfud yang memperoleh informasi dari Muhaimin bercerita, setelah berdiskusi dengan Said, Ma'ruf memerintahkan Robikin supaya menyatakan pendapat pada khalayak publik bahwa NU akan mencabut dukungannya kepada kubu pemerintahan Jokowi jika cawapresnya bukan berasal dari golongan NU sehingga pada ujungnya, di menit-menit akhir, Jokowi yang berencana menggandeng Mahfud MD kemudian mengubah pilihannya di “menit-menit akhir” dengan menggaet Ma'ruf Amin sebagai cawapres.⁵⁵ Namun, sesudah pihak Jokowi mengumumkan secara resmi nama cawapresnya, Ma'ruf Amin, dan setelah muncul kritikan dari Mahfud, Said berucap bahwa jawaban yang dia sampaikan ketika ditanya tentang keanggotaan Mahfud dalam NU hanyalah guyonan belaka. Oleh sebab itu, ia berharap berbagai pihak, khususnya Mahfud MD, tidak menganggapnya sebagai suatu keseriusan sehingga persoalan ini tidak perlu dibahas panjang lebar.

Pelbagai pernyataan yang dikeluarkan Said mengindikasikan bahwa NU mulai diarahkan kembali ke ranah politik praktis yang sebenarnya bertolak belakang dengan cita-cita Muktamar Situbondo yang menghendaki supaya NU berpolitik kebangsaan. Jika sikap politik yang ditunjukkan Said itu didasarkan atas keinginan untuk membawa semangat NU dengan ajaran Islam inklusifnya, tentu status keanggotaan Mahfud MD tidak dinafikan. Baik Mahfud MD maupun Ma'ruf Amin, keduanya merupakan orang NU sehingga tidak perlu dipilah-pilih. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: Mahfud “dijegal” untuk memuluskan langkah Ma'ruf Amin menjadi cawapres.

Terlebih lagi, saat dipinang oleh Joko Widodo, Ma'ruf Amin masih mengemban amanah sebagai Rais Am PBNU yang notabene jabatan tertinggi yang tidak dapat digandengkan dengan jabatan politis. Tidak mengherankan, beberapa kiai NU lantas memberikan respons yang berisi tuntutan agar Ma'ruf Amin mundur dari Rais Am. Termasuk di dalamnya adalah KH A. Mustofa Bisri, Pengasuh Pesantren Raudhatut Thalibin Rembang, yang pada periode sebelumnya menjadi Rais Am PBNU.⁵⁶ Di berbagai daerah, juga muncul suara senada dari para kiai yang menghendaki agar Ma'ruf Amin

⁵³ Mahfud MD sendiri tercatat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU). <https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/mahfud-md-gagal-jadi-cawapres-jokowi-karena-diisukan-bukan-kader-nu>, diakses pada Rabu, 28 November 2018, pada jam 11.57 WIB.

⁵⁴ news.detik.com/berita/4167029/mahfud-md-bongkar-manuver-maruf-amin-di-balik-kegagalan-cawapres, diakses pada Rabu, 28 November 2018, pada jam 11.57 WIB.

⁵⁵ www.liputan6.com/pilpres/read/3614715/detik-detik-koalisi-jokowi-berbelok-tajam-dari-mah-fud-md-ke-maruf-amin, diakses pada Rabu, 28 November 2018, pada jam 11.57 WIB.

⁵⁶ news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4158792/gus-mus-maruf-amin-harus-mundur-dari-rais-aam-pbnu, diakses pada Rabu, 28 November 2018, pada jam 12.05 WIB.

meletakkan jabatannya dari PBNU. Barulah, setelah beberapa hari kemudian, PBNU pun membahas status Rais Am Ma'ruf Amin sepulang dari ibadah haji.⁵⁷

Tidak lama berselang, Said justru memberikan pernyataan yang menegaskan adanya dukungan NU kepada pasangan nomor 01 dengan alasan Ma'ruf Amin yang maju sebagai cawapres merupakan Rais Am PBNU sehingga harus dimenangkan.⁵⁸ Sikap Said ini mengindikasikan, NU telah dijadikan “mesin politik” untuk mendulang suara bagi kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.

Terlepas dari *background* Ma'ruf Amin yang merupakan tokoh NU, pemberian perintah oleh Said yang notabene Ketua Umum PBNU untuk memenangkan Ma'ruf Amin telah merusak *muruah* NU. Sebab, secara kelembagaan, Ma'ruf Amin tidak lagi menjabat Rais Am. Di samping itu, Ma'ruf Amin maju sebagai cawapres dengan mengatasnamakan dirinya pribadi, bukan mewakili NU. Kalaupun Ma'ruf Amin maju dengan membawa nama NU, maka langkah tersebut justru menyalahi statuta NU yang melarang Rais Am mempunyai jabatan ganda di tingkat politik. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa sikap politik NU—yang direpresentasikan oleh pengurusnya—pada saat ini telah mengarah pada politik praktis murni tanpa ada nuansa kebangsaan. Kalau pun ada semangat untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam inklusif, ia telah ditumpangi oleh berbagai kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga dukungan NU kepada kubu Jokowi cenderung lebih tendensius, seperti halnya dukungan partai politik yang mengharapka adanya timbal balik dari partai koalisi.

Proses yang penuh “lika-liku” atas pemilihan Ma'ruf Amin menjadi cawapres Jokowi justru membuat sebagian kalangan NU sendiri mulai kehilangan simpatik. Tak pelak, di level akar rumput, tidak sedikit nahdliyin justru menyayangkan perilaku politik yang ditunjukkan oleh Said dan Ma'ruf. Terbukti, sebagian orang NU di Madura bahkan membentuk aliansi yang menolak mendukung Ma'ruf Amin, sebagai bentuk solidaritas kepada Mahfud MD yang tidak jadi dipilih menjadi cawapres Jokowi pada menit-menit akhir. Dampaknya, mereka akan mengalihkan suaranya kepada Prabowo-Sandi.

⁵⁷ www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/08/17/pbnu-akan-bahas-status-rais-aam-setelah-maruf-amin-pulang-haji, diakses pada Kamis, 29 November 2018, pada jam 07.52 WIB.

⁵⁸ www.cnnindonesia.com/nasional/20180814171857-32-322232/pbnu-siap-menangkan-jokowi-maruf-amin-di-pilpres-2019, diakses pada Kamis, 29 November 2018, pada jam 08.07 WIB.

Ini belum termasuk berbagai komentar Ma'ruf Amin di berbagai tempat yang justru semakin memunculkan sikap tidak percaya dari nahdliyin, salah satunya, yaitu ketika ia berceramah di Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris), ia mengatakan bahwa Esemka akan dirilis di bulan Oktober 2018.⁵⁹ Sementara faktanya, hingga November, belum ada tanda-tanda rencana perilisan kendaraan yang digadang-gadang menjadi mobil nasional tersebut. Bahkan, pada kesempatan yang lain, Jokowi sendiri justru berujar bahwa produksi Esemka tidak ada hubungannya dengan pemerintah karena telah dimiliki oleh perusahaan swasta.⁶⁰

Ketidakselarasan antara ucapan Ma'ruf dengan kenyataan yang terjadi justru akan semakin membuat masyarakat tidak hormat kepada dirinya. Dapat dikatakan, Ma'ruf Amin tidak mampu mengemban semangat politik kebangsaan yang dicita-citakan dalam pedoman politik warga NU yang berlandaskan etika, moral, dan akhlak mulia. Sebab, unsur *shidiq* pada pelbagai proses menuju pilpres, baik sejak sebelum dicalonkan sebagai cawapres maupun dalam masa kampanye, tidak dapat terpenuhi.

H. Penutup

Laku politik NU terus mengalami dinamika, yang secara garis besar terbagi ke dalam dua jenis, yaitu politik kebangsaan dan politik kekuasaan. Dalam konteks Pilpres 2019, perjalanan menuju pemilihan presiden dan wakil presiden diwarnai dengan sikap struktural NU yang cenderung mengarah kepada politik praktis, dimulai sejak sebelum penetapan cawapres dari kubu Jokowi hingga masa kampanye. Bahkan, cara kurang elegan pun dilakukan demi terpilihnya calon tertentu dengan menafikan status keanggotaan bakal cawapres lainnya yang sama-sama berasal dari NU. Di sini, praktik “penjagalan” pihak lain sebagaimana yang lazim di dunia politik, dipertunjukkan.

Cara berkompetisi cawapres yang notabene tokoh NU itu justru menyebabkan munculnya sikap kurang simpatik dari sebagian nahdliyin sehingga sangat logis jika pergeseran preferensi warga NU dari pasangan

⁵⁹ www.idntimes.com/automotive/car/gregorius-pranandito/esemka-siap-diproduksi-massal-maruf-amin-sudah-seharusnya, diakses pada Kamis, 29 November 2018, pada jam 08.18 WIB.

⁶⁰ nasional.tempo.co/read/1139465/jokowi-produksi-mobil-esemka-tak-ada-urusannya-dengan-pemerintah. Lihat pula otomotif.kompas.com/read/2018/10/25/142443015/jokowi-bukan-presiden-yang-bikin-esemka, diakses pada Kamis, 29 November 2018, pada jam 08.24 WIB.

calon (paslon) Jokowi-Ma'ruf Amin menuju paslon nomor 02, Prabowo-Sandi, cukup besar. Meski demikian, hal ini tidak serta-merta menjadi “jaminan” bahwa seluruh suara warga NU mengalir kepada Prabowo dan Sandiaga Uno. Sebab, sebagaimana telah terjadi pada Pilpres 2019 silam, tidak sedikit pula warga NU yang memiliki fanatisme besar terhadap kiai pesantren yang dalam hal ini direpresentasikan oleh sosok Ma'ruf Amin.

Nahdlatul Ulama, Moderasi Islam, dan Budaya Demokrasi

Ahmad Rofiq

A. Pendahuluan

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi massa kemasyarakatan Islam yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama terkemuka. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan Islam tradisional, utamanya dalam sistem kehidupan pesantren. Di antara motivasi pembentukannya adalah karena keprihatinan para ulama terhadap perkembangan modernisme—dan dalam batas tertentu puritanisme—Islam dan keberhasilannya menarik banyak umat Islam dari wilayah ajaran dan praktik Islam tradisional.¹

Dalam usianya yang ke-94, NU telah mengalami empat fase. *Pertama*, sebagai *jam'iyah* atau organisasi sosial keagamaan. *Kedua*, sebagai organisasi sosial keagamaan plus partai politik. *Ketiga*, kembali ke Khittah 1926 menjadi *jam'iyah diniyah*. Setelah reformasi bergulir, 1998, atau katakanlah fase *keempat*, sebagai organisasi sosial keagamaan dengan “khittah plus”. Fase yang terakhir ini merupakan tambahan penulis. Hal ini diindikasikan dengan “keterpaksaan” atau “kesengajaan” NU memfasilitasi dan membidani kelahiran partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pola hubungan antara NU dan PKB—yang nyaris tidak pernah sepi dari konflik internal—mengalami fluktuasi yang sangat dinamis. Bahkan pada tahun 2009 yang lalu, PKB telah mengalami “pecah kongsi” dengan lahirnya

¹Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. xiii.